

RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN HASIL HUTAN 2014-2018



**FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2014**

KATA PENGANTAR

Pada 1969, Fakultas Kehutanan IPB dibagi menjadi Jurusan Manajemen Hutan dan Jurusan Teknologi Hasil Hutan. Dengan diterapkannya program mayor-minor di IPB (SK Rektor No. 001/K13/PP/2005), Jurusan Teknologi Hasil Hutan berubah menjadi Departemen Hasil Hutan (DHH). Rencana Strategis Departemen Hasil Hutan (DHH) Fakultas Kehutanan IPB 2014-2018, disusun mengacu kepada Rencana Strategis Fakultas Kehutanan IPB dan Rencana Strategis IPB 2013-2017.

Visi DHH 2014-2018 dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi bertaraf internasional dalam menghasilkan SDM bermutu dan mengembangkan IPTEKS di bidang teknologi pemanfaatan hasil hutan berdasarkan falsafah dan tujuan Pancasila. Diharapkan rencana strategis ini mampu menyebarkan visi DHH tersebut.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Fauzi Febrianto, MS

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi	2
BAB II ANALISIS SWOT	4
BAB III ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN	6
3.1. Visi	6
3.2. Misi	6
3.3. Tujuan dan Sasaran	7
BAB IV. KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	10
4.1. Kebijakan Strategis DHH 2014-2018	10
4.2. Program Strategis DHH 2014-2018	11
BAB V. STRATEGI PENDANAAN	14
5.1. Dana Masyarakat	14
5.2. Dana Pemerintah	15
BAB VI. STRATEGI EVALUASI DAN MONITORING	16

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi kehutanan di Indonesia dimulai dengan pembentukan Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor (Landbouw Hogeschool) yang kemudian diubah menjadi fakultas pada tahun 1940 dengan nama *Faculteit voor Landbouw-wetenschappen* yang sebelumnya berstatus sebagai Jurusan Pertanian dan Jurusan Kehutanan yang bernaung di bawah *Universiteit van Indonesie* (Universitas Indonesia). Fakultas Pertanian Universitas Indonesia memisahkan diri menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1963 dan berlokasi di Kampus Baranangsiang Bogor. Pemisahan ini diikuti oleh perubahan status dari Jurusan Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan (SK Pendirian No. 279 Tahun 1965 yang dikeluarkan Presiden RI Ir. Soekarno). Pada tahun 1968, Fakultas Kehutanan pindah ke gedung baru di Kampus Dramaga. Pada 1969, Fakultas Kehutanan dibagi menjadi Jurusan Manajemen Hutan dan Jurusan Teknologi Hasil Hutan dan sejalan dengan program kurikulum IPB, masa studi tingkat S1 berubah dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Dengan diterapkannya program mayor-minor di IPB (SK Rektor No. 001/K13/PP/2005), Jurusan Teknologi Hasil Hutan menjadi Departemen Hasil Hutan (DHH).

Program pascasarjana di bidang Ilmu Kayu dan Pengelolaan Hutan mulai dikembangkan sejak tahun 1978. Pada tahun 1990, program studi ini berubah menjadi program studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK) yang secara resmi telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 584/DIKTI/Kep/1993 tertanggal 2 Oktober 1993. Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan ini dilaksanakan di tingkat Fakultas Kehutanan IPB. Dengan diterapkannya program mayor-minor di IPB, sejak tahun 2005 DHH selain mengelola 1 mayor di program studi sarjana (S1) juga mengembangkan 2 program studi pascasarjana (S2 dan S3) yaitu PS Ilmu dan Teknologi Serat dan Komposit (PS ITSK) dan PS Rekayasa Disain Bangunan Kayu (PS RDBK). Sejak tahun 2011 DHH yang semula menawarkan 2 mayor program S3 saat ini hanya mengampu program Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan (PS ITHH) untuk PS S2 dan S3.

Selain tertua, PS THH merupakan PS terbaik di Indonesia dan menjadi rujukan PS sejenis di Indonesia dalam pelaksana Tri Dharma PT. Pengakuan ini dibuktikan juga dengan capaian akreditasi A dari BAN PT selama 3 periode berturut-turut yaitu periode 2001-2006; 2006-2011 dan 2011-2016) (Sertifikat No. 047/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011). Program studi S2 dan S3 ITHH) sejak tahun 2011 telah terakreditasi B oleh BAN PT.

Meningkatnya pengetahuan manusia tentang hutan membawa konsekuensi adanya tuntutan bahwa kemanfaatan pengelolaan hutan oleh suatu Negara tidak saja dibatasi oleh kemanfaatan lokal dan nasional, namun harus mampu pula mendatangkan kemanfaatan secara regional dan bahkan global. Situasi demikian akan membawa konsekuensi bahwa pendidikan kehutanan harus dapat pula menjawab persoalan lokal, nasional, regional dan global. Persoalan tersebut harus diselesaikan baik dengan solusi teknik dan teknologi kehutanan serta solusi non-teknis. Oleh karenanya implementasi Tri Dharma DHH Fakultas IPB ke depan harus memperhatikan dinamika persoalan kehutanan lokal, nasional, regional, global serta memperhatikan pula perkembangan keilmuan teknik dan teknologi kehutanan (*hard sciences*) dan ilmu-ilmu sosial terapan (*soft sciences*) yang relevan. Pemanfaatan ekosistem hutan hingga saat ini banyak dilakukan terhadap kayu dan hasil ikutan lainnya. Di pihak lain, bemanfaatannya sebagai energi biomasa (termasuk biofuel), sumberdaya lignoselulosa non kayu, dan bio-farmaka dari hasil hutan non kayu belum dimulai secara intensif. Selain itu karakteristik sumberdaya hutan berupa kayu sudah berubah dari semula

sebagian besar kayu berasal dari hutan alam menjadi kayu dari hutan tanaman sehingga karakteristik serta pemanfaatannya yang tepat perlu di kaji secara intensif.

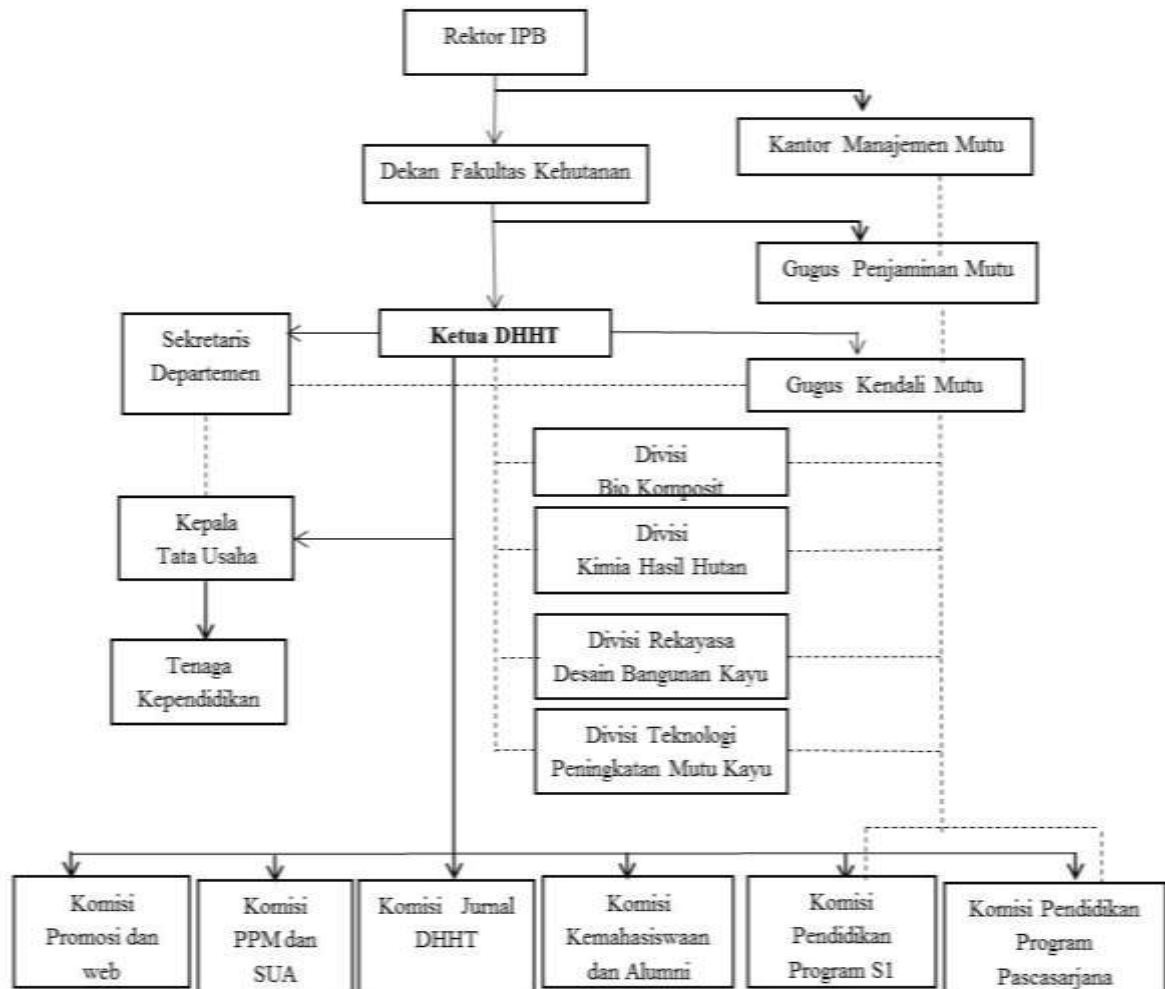
Pengembangan DHH dari masa ke masa juga berorientasi pada upaya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari dari berbagai sumberdaya hutan. Upaya ini dimanifestasikan ke dalam sistem kurikulum dan program yang lebih berorientasi pada pengumpulan fakta lapangan, multidisiplin dan penyelesaian masalah. Karakteristik ini menuntut DHH untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan berbasis kompetensi agar mampu bersaing dalam pasar kerja dan ke depan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas. DHH merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan posisi strategis dalam kaitannya dengan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu. Upaya secara intensif kegiatan karakteristik dan pemanfaatan kayu cepat tumbuh dari hutan tanaman, pemanfaatan sumber daya hutan kayu dan non kayu sebagai energi biomasa (termasuk biofuel), bahan serat nano selulosa dan selulosa nano komposit dan bio-farmaka merupakan salah satu tantangan bagi DHH ke depan.

1.2. Organisasi

Dalam sistem organisasi pengelolaan pendidikan di IPB, departemen merupakan unit penyelenggara pendidikan pada satuan Departemen. Mengacu kepada sistem tersebut Departemen Hasil Hutan (DHH) mengampu satu Program Studi (PS) Sarjana yakni PS Teknologi Hasil Hutan (PS THH) dan satu PS Pascasarjana yaitu PS Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan (PS ITHH). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 154 Tahun 2000 tentang penetapan IPB sebagai PT BHMN, maka IPB melalui SK Rektor No. 001/K13/PP/2005 tentang penataan departemen di lingkungan IPB telah menetapkan DHH sebagai pengelola mayor Teknologi Hasil Hutan (THH). Selanjutnya mayor THH dikenal sebagai PS THH. Ketua DHH sekaligus bertindak sebagai Ketua PS THH. Ketua DHH mengangkat Ketua PS pascasarjana sesuai dengan SK Rektor No.08/K13/KP/2006 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menetapkan Penugasan Ketua PS Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Berdasarkan pola kepemimpinan tersebut, dimana Ketua DHH juga sekaligus merangkap sebagai Ketua PS THH, maka pemilihan Ketua DHH dilakukan dengan mengacu pada SK Rektor Nomor 036/K.13/OT/2005 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengusulan Calon Ketua Departemen dan Pengusulan Calon Sekretaris Departemen di Lingkungan IPB.

Berdasarkan SK Rektor No. 34/K13/KP/2004 tentang Struktur Organisasi Pelaksana Administrasi dan Departemen di Lingkungan IPB, IPB telah menerapkan kebijakan sistem SADAR (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik dan Penelitian). Implementasi dari SADAR tersebut, IPB telah memposisikan departemen sebagai induk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, struktur organisasi DHH dibuat untuk menjamin terwujudnya tata kerja antar unit dalam organisasi Departemen sebagai induk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tugas dan mandatnya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan DHH (Gambar 1). Dalam struktur organisasi, DHH diketuai oleh seorang Ketua Departemen yang dipilih setiap 4 tahun sekali secara bertanggung gugat. Dalam menjalankan tugas hariannya, Ketua Departemen dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen, beberapa tenaga pendidik (dosen) yang ditugaskan sebagai Kepala Divisi dan komisi-komisi, serta unit layanan administrasi kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha (KTU). Sesuai SK Rektor IPB No. 126/I3/OT/2008 terdapat 4 (empat) divisi di DHH, yaitu (1) Biokomposit, (2) Kimia Hasil Hutan, (3) Rekayasa dan Desain Bangunan Kayu, dan (4) Teknologi Peningkatan Mutu Kayu. Kepala Tata Usaha

membawahi tenaga kependidikan (tendik) atau tenaga penunjang administrasi dan tenaga penunjang akademik (laboran). Personil yang terlibat dalam tata pamong dan kepemimpinan departemen dipilih dan ditetapkan berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam SK Rektor.



Gambar 2.1 Struktur organisasi DHH. Keterangan: Garis komando (—>) dan garis koordinasi (- - -)

BAB II. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi DHH. Kajian faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan DHH dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan relevansi DHH terhadap kebutuhan lapangan kerja. Sedangkan analisis faktor eksternal meliputi ancaman dan peluang bagi DHH untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan relevansi DHH terhadap kebutuhan lapangan kerja

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi strategis DHH berada pada strategis progresif (Strategi O-S), yaitu mendayagunakan kekuatan untuk memanfaatkan semua peluang dalam rangka memperbaiki kelemahan serta mengurangi ancaman. Program yang akan dijalankan adalah untuk meningkatkan mutu dan relevansi berdasarkan peluang pendanaan yang ditawarkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta maupun dana publik lainnya, serta menggalang kerjasama program pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak. Pembinaan menyeluruh akan dilakukan oleh DHH dalam rangka meningkatkan kinerja, dengan fokus untuk meningkatkan jaminan mutu pendidikan guna meningkatkan mutu lulusan sesuai kompetensinya dan daya saing dalam memperebutkan pasar kerja. Disadari sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan kepemimpinan yang mampu memobilisasi seluruh sumberdaya secara efektif dan efisien, didukung oleh kerja keras dan komitmen seluruh elemen sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma di DHH.

Tabel 1 Analisis SWOT DHH

SWOT	Komponen
Kekuatan (Strength)	<ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama bidang pendidikan dan penelitian banyak baik di tingkat nasional maupun internasional2. Semua Program studi sudah terakreditasi BAN PT (Akreditasi A untuk PS THH dan akreditasi B untuk PS ITHH S2 dan S3).3. Sistem pengelolaan program berjalan dengan baik, didukung dengan dokumen perencanaan dan prosedur operasional baku yang memadai serta sistem penjaminan mutu telah diformulasikan di tingkat Institut, Fakultas dan Departemen, dan dilaksanakan secara konsisten.4. Mahasiswa memiliki kemampuan akademik yang baik.5. Lulusan memiliki daya adaptasi yang tinggi dalam memperoleh pekerjaan dan bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri6. Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sangat baik (sebagian besar bergelar doktor dan tersertifikasi) serta mendapat pengakuan ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional7. Kurikulum IPB yang luwes, inovatif dan kompatibel dengan dinamika regulasi PT.8. Program Studi menjadi <i>trend setter</i> untuk PS sejenis di Indonesia9. SDM DHH mampu berkompetensi dalam memperoleh dana penelitian, baik berskala nasional maupun internasional.10. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat memadai sehingga dapat

	mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik
Kelemahan (Weakness)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalanya pengelolaan karena kurangnya kompetensi tenaga kependidikan 2. Umpan balik dari pihak eksternal masih kurang dan belum berkelanjutan. 3. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keahliannya masih cukup lama (4-6 bulan). 4. Kemampuan mahasiswa berbahasa Inggris masih kurang 5. FTE/SWMP staf pengajar rata-rata sudah cukup baik, namun beban kerja belum terdistribusi merata 6. Sistem pengukuran kepuasan pengguna terhadap lulusan DHH belum dilakukan secara berkelanjutan 7. Kurangnya anggaran pemeliharaan peralatan laboratorium 8. Banyaknya peralatan laboratorium yang sudah berusia tua dan kurang terawat dengan baik
Peluang (Opportunity)	<ol style="list-style-type: none"> 1. DHH bernaung di bawah IPB yang sudah dikenal luas baik di dalam maupun di luar negeri 2. Kesempatan yang cukup luas untuk inovasi sistem pengelolaan berbasis TI. 3. Industri berbasis teknologi hasil hutan memiliki prospek semakin berkembang untuk peluang kerja dan berusaha 4. Tersedianya dana hibah penelitian dan kerjasama dari pemerintah, swasta dalam dan luar negeri untuk meningkatkan <i>capacity building</i> dari dosen DHH. 5. Lulusan DHH dapat diserap oleh bidang lain selain bidang industri hasil hutan 6. Kebutuhan masyarakat dan industri terhadap jasa pengujian dan standarisasi produk semakin meningkat. 7. Pengakuan terhadap hasil penelitian oleh masyarakat internasional semakin tinggi ditambah dengan kurikulum yang telah terakreditasi internasional.
Ancaman (Threat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan sistem pendidikan perguruan tinggi. 2. Animo calon mahasiswa terhadap program studi kehutanan dan hasil hutan berkurang. 3. Adanya peluang pekerjaan dari pihak luar yang lebih menjanjikan. 4. Masih terbatasnya dunia industri mengenal DHH sebagai terutama sebagai pusat pelayanan jasa pengujian dan sertifikasi produk industri hasil hutan 5. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memerlukan penyesuaian sarana dan prasarana

BAB III. ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

3.1 Visi

Dalam Statuta IPB sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 (1) PP 66/2013, IPB memiliki visi menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Sementara dalam dokumen Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018, visi IPB adalah “menjadi Perguruan Tinggi Berbasis Riset, Bertaraf Internasional, dan Penggerak Prima Pengarusutamaan Pertanian”. Merujuk pada kedua visi besar IPB jangka menengah dan jangka panjang, maka program pengembangan pendidikan tinggi kehutanan IPB ke depan harus berbasis riset dan bertaraf internasional, sehingga mampu memperkokoh martabat bangsa sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional maupun global. Visi Fakultas Kehutanan IPB 2014-2018 adalah menjadi “Fakultas kehutanan berbasis riset dan bertaraf internasional dalam memperkokoh martabat bangsa”. Mengacu pada visi jangka panjang IPB dan Fakultas Kehutanan IPB 2014-2018 di atas maka visi Departemen Hasil Hutan (DHH) 2014-2018 dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang adalah: “Menjadi lembaga pendidikan tinggi bertaraf internasional dalam menghasilkan SDM bermutu dan mengembangkan IPTEKS di bidang teknologi pemanfaatan hasil hutan berdasarkan falsafah dan tujuan Pancasila”.

3.2 Misi

IPB sebagai Perguruan Tinggi Nasional yang diberi kesempatan untuk mengembangkan otonomi pengelolaan perguruan tinggi mengemban misi. Misi IPB jangka panjang tercantum dalam Statuta IPB (PP nomor 66 tahun 2013), yakni:

1. Menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.
2. Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa;
3. Mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada visi yang sudah ditetapkan, maka Fakultas Kehutanan IPB ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan kehutanan berbasis riset agar menghasilkan kualitas sumber pembelajaran yang optimal, melalui kemaslahatan kurikulum yang *concise* berorientasi pada pengguna dan perkembangan IPTEKS kehutanan.
2. Pengembangan IPTEKS kehutanan yang mutakhir dan menjawab tantangan serta permasalahan global kehutanan.
3. Penguatan peran dan kontribusi melalui hasil riset dan kerangka konseptual kehutanan untuk meningkatkan reputasi kehutanan serta memperkokoh martabat bangsa.
4. Peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan beserta ekosistemnya untuk kemaslahatan umat manusia.

5. Memperkuat sistem manajemen fakultas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan visinya, DHH menetapkan misi untuk kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu yang berbasis penelitian (*research based*) dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif menuju *world class institution*.
2. Mengembangkan IPTEKS pemanfaatan hasil hutan dan melakukan layanan masyarakat yang mengedepankan inovasi IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pembangunan industri pemanfaatan hasil hutan secara efisien, adil dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan departemen melalui manajemen perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan.
4. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, memiliki sikap dan perilaku yang responsif, kooperatif dan kreatif sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan integritas.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misinya, IPB menetapkan tujuan yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan dan menerapkan IPTEKS.
2. Memberikan inovasi IPTEKS ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional dan global.
4. Menjadikan IPB sebagai kekuatan moral dalam masyarakat madani Indonesia.

Dengan merujuk pada visi dan misi ke depan, maka tujuan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fahutan IPB tahun 2014-2018 adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter rimbawan, berkompeten dan mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEKS kehutanan.
2. Menghasilkan publikasi dan inovasi IPTEKS kehutanan ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Fahutan IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi kehutanan terkemuka di tingkat nasional, regional maupun global yang siap menghadapi tuntutan dan tantangan pembangunan kehutanan.
4. Menjadikan sistem manajemen fakultas yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan siap berkompetisi dan bersinergi secara nasional, regional dan global.

DHH telah mengidentifikasi tujuan menjadi 4 kelompok dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi di atas yaitu:

1. Mengoptimalkan pengembangan kapasitas sumberdaya melalui kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional.
2. Mengoptimalkan pemberdayaan IPTEKS pemanfaatan hasil hutan melalui pengajaran, penelitian, publikasi, serta pelayanan pada masyarakat, yang dapat meningkatkan mutu departemen.
3. Mewujudkan manajemen pengelolaan sumberdaya departemen yang bermutu, profesional dan terbuka dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan siap berkompetisi dan bersinergi secara nasional dan global yang bermanfaat bagi kesejahteraan di lingkungan DHH dan masyarakat.
4. Menghasilkan lulusan DHH bertaraf internasional yang mempunyai dasar ketrampilan, kemampuan analisis dan sintesis yang andal, serta profesionalisme dan kemandirian yang kuat pada bidang ilmu dan teknologi hasil hutan, dan berjiwa kewirausahaan

Dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan di atas, DHH menetapkan sasaran untuk jangka waktu 5 tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan 1: Dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan 1 DHH menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tersusunnya RENSTRA sumber daya DHH menuju/menjadi *world class institution*.
2. Terbentuknya kurikulum berbasis kompetensi bertaraf internasional yang juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Tersedianya tenaga pengajar DHH berkompetensi tinggi untuk menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
4. Tersedianya peralatan laboratorium yang lengkap dengan kualitas yang memadai
5. Tersedianya buku dan jurnal (termasuk jurnal *online*) bermutu dengan ruang baca berstandar internasional
6. Kesetaraan SKS dengan manca negara
7. Terbentuknya program *join degree*

Tujuan 2: Dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan 2 di atas, DHH menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tersosialisasinya visi dan misi departemen
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas staf pengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah internasional.
3. Terlaksananya sistem pengajaran dan pelayanan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu
4. Terjalinnnya kerjasama saling menguntungkan di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pemberdayaan sumberdaya yang tersedia

Tujuan 3: Dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan 3 di atas, DHH menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya administrasi akademik yang cepat dan akurat dengan layanan komputerisasi terpadu.
2. Tersedianya administrasi PPM yang cepat dan akurat dengan layanan komputerisasi terpadu.
3. Terwujudnya disiplin mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium yang tinggi
4. Terwujudnya kesejahteraan SDM departemen

Tujuan 4: Dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan 4 di atas, DHH menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terjaminnya lulus tepat waktu.
2. Terjaminnya kualitas lulusan DHH sesuai standar internasional
3. Tercapainya waktu tunggu kerja yang singkat
4. Meningkatnya jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian
5. Meningkatnya prestasi mahasiswa di bidang soft skill dan kewirausahaan

3.4. Arah dan Rencana Pengembangan

Arah pengembangan DHH ke depan sesuai dengan arah dan pengembangan IPB, yaitu bahwa hingga tahun 2025 difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama. Pertama, membangun pondasi-pondasi Universitas Berbasis Riset (*Research Based University*) dan *Enterpreneurial University*. Dengan modal ini ditargetkan DHH memiliki daya saing tinggi dan untuk menuju ke arah tersebut perlu dilakukan secara lebih agresif melalui upaya-upaya kondusif stimulatif. Kedua, membangun *institutional building* dan *good university governance*. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). DHH harus dapat berkontribusi pada terciptanya dan meningkatnya kesejahteraan sosial (*social prosperity*) di masyarakat luas yang mencakup pemecahan masalah, pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja. Hal ini diharapkan dapat terjadi melalui produk lulusan, produk riset dan produk usaha komersial yang dikembangkan DHH sesuai dengan kompetensinya.

Kemampuan DHH Fahutan IPB berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas akan berimplikasi baik terhadap peningkatan kepercayaan publik. Pengembangan riset baik berupa hibah-hibah riset atau riset kerjasama (*collaborative research*), selanjutnya dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar (PBM, mendorong partisipasi mahasiswa dan dosen dalam berbagai paket riset yang mempercepat laju lulusan, publikasi ilmiah, paten, dan produk riset komersial. Peningkatan laju lulusan, publikasi, riset dan perolehan paten menjadi pembangkit citra publik (*public recognition/trust*). Arah pengembangan *good university governance* di DHH, melalui penyempurnaan sistem ketatapamongan yang akan membangun *trust* dan *confidence* para *stakeholders*.

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS

4.1 Kebijakan Strategis DHH 2014-2018

Untuk mencapai tujuan pertama yaitu mengoptimalkan pengembangan kapasitas sumberdaya melalui kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional maka strategi yang dikembangkan adalah ekspansi dan kolaborasi dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pengembangan sumberdaya manusia departemen hasil hutan
2. Pengayaan sarana prasarana laboratorium dan perpustakaan.
3. Sistem penugasan dosen yang proporsional dan menantang
4. Peningkatan kompetensi dosen melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Meningkatkan peran dosen melalui kegiatan *mentoring postdoctoral* baik program *teaching-postdoctoral* maupun *research fellow*.
6. Meningkatkan program *guest scientists* dengan cara mendatangkan ilmuwan luar negeri dalam rangka kerjasama pendidikan dan riset.
7. Meningkatkan kemampuan riset dosen melalui program *sabbatical leave*.
8. Evaluasi kinerja dosen dan pegawai administrasi dan laboran

Untuk mencapai tujuan kedua yaitu mengoptimalkan pemberdayaan IPTEKS pemanfaatan hasil hutan melalui pengajaran, penelitian, publikasi, serta pelayanan pada masyarakat, yang dapat meningkatkan mutu departemen maka strategi yang dilakukan oleh DHH adalah strategi pendayagunaan IPTEKS dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan yang berkelanjutan melalui berbagai cara dan setiap kesempatan kepada seluruh civitas akademika
2. Pemantapan sistem koordinasi perencanaan pemberdayaan IPTEKS.
3. Meningkatkan ketersediaan data/informasi IPTEKS
4. Penyebaran informasi IPTEKS secara luas
5. Meningkatkan kualitas materi dan hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan ilmu itu sendiri, untuk pendidikan, untuk kepentingan usaha, serta masyarakat.
6. Meningkatkan standar mutu penelitian melalui riset kolaboratif internasional berjangka panjang dengan mitra universitas strategis pada area-area frontier seperti bioteknologi dan nanoteknologi.
7. Peningkatan keterlibatan dosen pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta sebagai pemakalah pada kegiatan seminar atau symposium

Untuk mencapai tujuan ketiga yaitu mewujudkan manajemen pengelolaan sumberdaya departemen yang bermutu, profesional dan terbuka dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan siap berkompetisi dan bersinergi secara nasional dan global

yang bermanfaat bagi kesejahteraan di lingkungan DHH dan masyarakat maka strategi yang dilakukan oleh DHH adalah strategi penerapan manajemen perguruan tinggi yang efektif dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi
2. Pemantapan prosedur operasional baku (POB) pada seluruh aktivitas pelayanan akademik dan Penyusunan POB Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) dan Penyusunan POB administrasi kepegawaian secara terpadu.
3. Pemantapan pelayanan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (ITK) sehingga seluruh civitas dapat melakukan akses internet setiap saat.
4. Pemantapan unit satuan usaha akademik (SUA) sebagai unit yang melaksanakan kerjasama dan pelayanan pengabdian yang dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan.
5. Membina dan menyetarakan standar kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh tenaga-tenaga teknis untuk mendukung ketersediaan, kehandalan, interoperabilitas dan fungsi layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
6. Pengoptimalan potensi yang dimiliki departemen sebagai *income generating* dengan target dapat menambah kesejahteraan dosen dan staf pegawai.

Untuk mencapai tujuan keempat yaitu menghasilkan lulusan DHH bertaraf internasional yang mempunyai dasar ketrampilan, kemampuan analisis dan sintesis yang andal, serta profesionalisme dan kemandirian yang kuat pada bidang ilmu dan teknologi hasil hutan, dan berjiwa kewirausahaan maka strategi yang dilakukan oleh DHH adalah strategi pembinaan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Perintisan program dosen tamu untuk beberapa mata kuliah baik dari lembaga peneliti maupun kalangan pengusaha dalam atau luar negeri.
2. Penerapan evaluasi akademik pada seluruh mahasiswa sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman akademik IPB
3. Pelaksanaan *studium general* untuk penajaman kemampuan, wawasan dan kesiapan mental lulusan menghadapi persaingan dunia kerja atau meningkatkan semangat berwirausaha.
4. Meningkatkan mobilitas mahasiswa ke manca negara dalam kegiatan praktek kerja dan kegiatan penelitian mahasiswa.
5. Promosi intensif pada berbagai jalur seleksi masuk IPB termasuk ke manca negara untuk meningkatkan *competitive rate*.
6. Pemantapan implementasi kurikulum sesuai standar kompetisi internasional dari *Society of Wood Science and Technology* (SWST-USA) dan KKNI
7. Pengembangan cakupan kerjasama dan penggalangan komunikasi intensif dengan instansi pemerintah dan industri, baik di dalam negeri mau pun manca negara dalam kegiatan praktek kerja dan kegiatan penelitian mahasiswa.

4.2 Program Strategis DHH 2014-2018

Program-program strategis yang akan dilakukan oleh DHH di bidang Tri

Dharma Perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

- (1) Akreditasi internasional PS THH oleh SWST USA
- (2) Peningkatan kualitas program pasca sarjana melalui peningkatan status akreditasi Program Studi S2 dan S3 (PS ITHH) DHH dari status akreditasi B menjadi A
- (3) Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui sertifikasi SNI ISO 90001:2008 *Quality Management System*
- (4) Pemantapan kurikulum, substansi bahan pengajaran, kelengkapan kepastakaan, pelaksanaan pendidikan kritis, penerapan *student centered learning* (SCL) dalam pembelajaran
- (5) Peningkatan kerjasama internasional bidang pendidikan melalui program *credit earning, summer course, dan english chapter dan english class*
- (6) Perluasan kerjasama pendidikan melalui program joint degree dengan universitas luar negeri
- (7) Membangun sistem teknologi informasi dan sistem insentif guna memacu peningkatan kualitas pendidikan
- (8) Peningkatan kualitas input mahasiswa
- (9) Peningkatan kualitas lulusan (IPK, masa studi dan masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan)
- (10) Mendorong studi lanjut dan peningkatan kualifikasi jabatan fungsional dosen
- (11) Peningkatkan jumlah internasional *studium generale*
- (12) Pembentukan divisi Manajemen dan Industri Hasil Hutan untu penguatan kualitas lulusan
- (13) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan
- (14) Peningkatan fasilitas pendidikan
- (15) Peningkatan promosi melalui perbaikan leaflet, booklet dan web DHH

2. Penelitian

- (1) Melakukan pemetaan *research demand*, menetapkan *road map* dan kegiatan riset unggulan sesuai dengan mandae divisi-divisi yang ada di DHH
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas proposal penelitian dan publikasi ilmiah
- (3) Peningkatan jumlah inbound dan outbound dosen dan mahasiswa
- (4) Penguatan jaringan kerjasama penelitian (*collaborative research*), baik secara nasional, regional, maupun global, baik dengan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga

penelitian terkemuka di bidang Teknologi Hasil Hutan dan terkait

- (5) Penguatan kapasitas SDM untuk melakukan kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian
- (6) Mendorong penelitian yang dilakukan berkontribusi dengan sangat nyata dalam perkembangan perekonomian masyarakat
- (7) Mendorong peningkatan jumlah karya inovasi, hak kekayaan intelektual dan komersialisasinya
- (8) Peningkatan kualitas laboratorium sebagai ujung tombak pengembangan IPTEKS.
- (9) Peningkatan peran aktif dosen sebagai pakar di tingkat nasional dan internasional
Jumlah kegiatan advokasi yang dilakukan oleh dosen

3. Pengabdian Pada Masyarakat

- (1) Mengadakan sosialisasi, diseminasi, pendampingan dan umpan balik hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pemecahan persoalan pembangunan kehutanan dan lingkungan terutama bidang Teknologi Hasil Hutan
- (2) Penguatan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan industri sebagai wahana untuk menyumbangkan hasil-hasil penelitian, tanggapan terhadap permasalahan kehutanan khususnya di bidang hasil hutan dan penempatan mahasiswa dalam melakukan praktek kerja lapang (PKL) dan penelitian tugas akhir
- (3) Peningkatan jumlah pelayanan pengujian (unit SUA) dan pendampingan dengan kelompok pengrajin kayu dan industri kayu rakyat di Bogor melalui program DHH peduli industri kayu rakyat
- (4) Meningkatkan motivasi dosen untuk membuat proposal PPM
- (5) Peningkatan kualitas dan kuantitas laboratorium terpadu DHH sebagai media pengabdian pada masyarakat

4. Kemahasiswaan

- (1) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang mendorong kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung
- (2) Peningkatan kemampuan bahasa inggris mahasiswa melalui program himpunan profesi
- (3) Meningkatkan keikutsertaan mhs ke dalam aktivitas seminar, symposium internasional
- (4) Peningkatan kuantitas dan kualitas proposal PKM
- (5) Penyelenggaraan *international go field* ke perguruan tinggi, lembaga-lembaga terkait kompetensi PS THH dan industri hasil hutan di Negara-negara ASEAN

BAB V. STRATEGI PENDANAAN

Selama lima tahun ke depan (2014-2018), strategi pendanaan untuk pengembangan DHH IPB mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2013, PP No. 66 Tahun 2013. Selain itu, juga mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan tinggi nasional, Kebijakan Umum dan Rencana Jangka Panjang IPB, program-program pengembangan IPB, sasaran yang ingin dicapai, dan implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Pada periode Renstra 2013-2017. Jika terjadi dinamisasi dalam regulasi penganggaran APBN di masa mendatang, diperkirakan viabilitas pendanaan IPB untuk investasi masih tetap dihadapkan pada ketidakpastian, tetapi untuk pendanaan operasional relatif akan lebih stabil. Dengan demikian, pembiayaan harus lebih fokus pada penyelenggaraan program yang memiliki dampak langsung pada pencapaian visi dan tujuan renstra IPB. Hal ini dilakukan melalui penetapan skala prioritas, misalnya dengan berpegang pada tema-tema program tahunan (*roadmap*) dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas/kinerja yang dihasilkan dan penguatan kapasitas institusi.

5.1. Sumber Dana dan Kebijakan Penerimaan DHH

Pada periode 2014-2018 dana pengembangan DHH IPB yang dapat digunakan terutama bersumber dari dana pemerintah dan dana masyarakat. Sumber dana lainnya meliputi bantuan luar negeri dan lembaga-lembaga pendanaan nasional dan internasional tetap akan diusahakan secara maksimum terutama untuk penguatan investasi institusi.

1. Dana Pemerintah

Sumber dana pengembangan IPB tahun 2014-2018 dari dana pemerintah, meliputi:

- (1) Dana Pemerintah Pusat dari APBN yang dituangkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB untuk membiayai kebutuhan dasar/pembiayaan utilitas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi IPB dan pembiayaan penyelenggaraan kebutuhan dasar, serta pembiayaan untuk pengembangan IPB yang sifatnya reguler (untuk pembiayaan kebutuhan minimal peningkatan penyelenggaraan pendidikan terutama untuk mendukung pengembangan pendidikan program sarjana) dan kegiatan yang sifatnya prioritas nasional (untuk pembiayaan beasiswa program sarjana, pasca sarjana dan vokasi);
- (2) Dana Pemerintah Pusat dari APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Kementerian /Lembaga untuk membiayai program pengembangan melalui pembiayaan kegiatan yang bersifat penugasan khusus (hibah dan bentuk lainnya) dan bantuan biaya operasional;
- (3) Dana Pemerintah Daerah dari APBD dalam rangka aktivitas kerjasama untuk pembangunan daerah dan perluasan akses pendidikan (pendidikan sarjana) melalui program Beasiswa Utusan Daerah (BUD).

2. Dana Masyarakat

Sumber penerimaan dana masyarakat untuk pengembangan IPB tahun 2014-2018, meliputi:

- (1) Sumbangan pembinaan pendidikan dari mahasiswa dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) khususnya UKT program sarjana. Selain itu sumbangan biaya operasional pendidikan dari mahasiswa program sarjana beasiswa utusan daerah (BUD), program pascasarjana.

- (2) Dana Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikoordinasikan oleh LPPM dan fakultas maupun kerjasama kreatif dari unit-unit kerja lainnya;
- (3) Pendapatan lain-lain (pendapatan sewa fasilitas, jasa program, *endowment fund*, jasa bank, donatur dan lain-lain).

Kebijakan penerimaan dana IPB tahun 2013-2017 dengan memperhatikan sifat, bentuk, besaran, dan mekanisme penerimaan DHH tahun 2013 dan adanya perubahan sistem keuangan pemerintah, adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan capaian besaran penerimaan yang bersumber dari APBN melalui program-program kompetitif untuk kegiatan riset dan pengembangan institusi;
- (2) Meningkatkan capaian besaran penerimaan yang bersumber dari APBD melalui program hibah fasilitas fidik dan kerjasama program termasuk BUD;
- (3) Meningkatkan capaian besaran penerimaan yang bersumber dari APBN melalui bantuan biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN);
- (4) Mengoptimalkan perolehan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari UKT dan sumbangan biaya operasional pendidikan bentuk lainnya, dengan tetap memperhatikan bantuan/subsidi bagi mahasiswa terutama mereka yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah;
- (5) Mengoptimalkan penerimaan IPB melalui program kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional untuk penyelenggaraan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kompetitif atau hibah dan/atau *soft loan*, *corporate social responsibility* (CSR) dan sejenisnya.

5.2. Fungsi dan Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran dana DHH periode 2014-2018 memperhatikan sifat dan besaran pengeluaran DHH tahun 2013 dan perubahan sistem keuangan pemerintah yang berlaku, sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran untuk kebutuhan dasar DHH meliputi pembiayaan utilitas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DHH dan pembiayaan penyelenggaraan kerumahaan kampus dan perkantoran (pembiayaan rutin) akan dibiayai dari APBN, dan dana masyarakat sebagai dana suplemen. Pengeluaran untuk program-program pengembangan IPB yang menjadi prioritas terutama investasi infrastruktur, fasilitas dan properti, dan penyelenggaraan riset unggulan secara komplementer akan dibiayai dari APBN dan dana tambahan non reguler berupa "pembiayaan khusus" yang diperoleh secara kompetitif maupun penugasan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (2) Memaksimalkan pengeluaran dari sumber bantuan/hibah lembaga donor nasional atau internasional untuk investasi infrastruktur, fasilitas, properti, serta untuk pelaksanaan/diseminasi kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Mengoptimalkan pengeluaran yang bersumberkan dari dana masyarakat untuk kegiatan operasional penyelenggaraan program, manajemen institusi, dan kesejahteraan khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan.

BAB VI. STRATEGI EVALUASI DAN MONITORING

Indikator keberhasilan renstra dapat dilihat dari kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efektif dan efisien, serta kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem. Strategi monitoring dan evaluasi kinerja merupakan bagian yang esensial dan tak terpisahkan dari Renstra DHH 2014-2018. Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati, meninjau dan mempelajari kembali serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukan masalah, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai *koreksi dini* agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Selain itu kegiatan monitoring untuk mengetahui kesesuaian antar rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra IPB 2008-2012 dengan hasil yang dicapai.

Evaluasi kinerja adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra DHH 2014-2018 dan dijabarkan dalam rencana tahunan, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. Strategi monitoring dan evaluasi kinerja diutamakan pada peningkatan mutu akademik dan sistem manajemen. Acuan utama pengukuran pada standardisasi DHH sesuai dengan yang berlaku di IPB, dan mengacu pula pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Badan Akreditasi Nasional (BAN), dan standar akreditasi internasional. Standardisasi tersebut mencakup standardisasi mutu akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), sedangkan monitoring dan evaluasi kinerja pada capaian mutu kinerja pada unit-unit pelaksana kegiatan mencakup: keluaran (*output*), hasil (*outcomes/result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*) dari tiap program/kegiatan dengan bantuan instrumen Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang dicapai dari monitoring dan evaluasi kinerja;
2. Pelaksanaan dilakukan secara obyektif;
3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja agar hasilnya sah dan handal;
4. Pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak bersangkutan mengetahui hasilnya untuk kemudian dapat dilaporkan kepada *stakeholders* melalui berbagai cara;
5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif);
6. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal (akuntabel);
7. Mencakup seluruh obyek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi kinerja secara komprehensif;
8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;

9. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
10. Berbasis indikator kinerja dan
11. Dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target monitoring dan evaluasi kinerja dicapai dengan menggunakan sumberdaya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.